



Available : <https://journal.isi-padangpanjang.ac.id/index.php/JTST>

Vol 2, No 2, dec 2023

E-ISSN: 2962-5378

---

## **Analisis Pengaruh Konflik Rempang Galang terhadap Destinasi Wisata**

Amillia Suwandi<sup>1</sup>, Agus Kuncoro<sup>2</sup>

Universitas Terbuka Batam

Jl. Dr. Sutomo No.3, Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29424

Email: [amilliaswnd1@gmail.com](mailto:amilliaswnd1@gmail.com), [aguskuncoro05@gmail.com](mailto:aguskuncoro05@gmail.com)

### **Abstract**

The case of the Rempang community occurred due to the lack of legal protection for their land which was then labeled as squatters. Due to misunderstandings between local communities and the government, this creates quite serious conflicts due to territorial struggles. The Rempang-Galang conflict caused a decrease in the number of visitors to tourist areas on the island. The decline in the number of visitors has caused the local economy to decline. In fact, the chaos that occurred between the government and the Rempang community made visitors afraid to go on tours to tourist areas around Rempang-Galang.

**Keywords:** conflict, chaos, rempang-galang, struggles, tourism

**Amillia Suwandi, Agus Kuncoro**

**JTSTI-Journal of Tourism Sciences, Technology and Industry**

**Vol 2, No 2, dec 2023**

**E-ISSN: 2962-5378**

## **PENDAHULUAN**

Pulau Rempang, bersama dengan Pulau Galang dan Pulau Batam, membentuk wilayah yang dikenal sebagai Kota Batam. Kota ini terletak di provinsi Kepulauan Riau dan telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu faktor yang berperan dalam pertumbuhan ini adalah lokasinya yang strategis, berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, serta menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam.

Sejarah Pulau Rempang sangat kaya. Selama masa kolonial, pulau ini pernah dihuni oleh berbagai suku dan komunitas etnis yang berbeda. Banyak peninggalan sejarah seperti candi dan bangunan bersejarah yang dapat ditemukan di pulau ini. Selain itu, Pulau Rempang juga dikenal sebagai tempat pengungsian bagi para pengungsi Vietnam selama Perang Vietnam, yang dapat ditemui di Pulau Galang. Kekayaan Wisata Alam Pulau Rempang juga patut diperhatikan. Pantai-pantainya yang indah, hutan mangrove, dan kehidupan laut yang beragam menawarkan berbagai kegiatan wisata. Aktivitas seperti snorkeling, diving, dan menikmati matahari terbenam di pantainya menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman alam yang unik.

Bicara tentang berita yang lagi trending mengenai Pulau Rempang, di Batam. Yakni adanya bentrokan antara penduduk asli masyarakat Rempang dengan aparat keamanan pemerintah sebab perebutan paksa hak masyarakat yg diambil oleh kuasa pemerintah untuk dibangunnya kawasan industri, pariwisata dan jasa yg dikenal dengan sebutan Rempang Eco City.

Dari beberapa konflik yang tengah terjadi di wilayah Pulau Rempang, menyebabkan kecemasan Masyarakat local akan kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan. Yang juga mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung karna beredarnya unggahan perselisihan antara Masyarakat dengan pihak BP Batam.



Gambar1. Warga Protes

### **PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK**

Masyarakat Rempang telah mengetahui adanya rencana proyek ini sejak tahun 2007. Proyek ini melibatkan PT MEG Group Artha Graha milik Tommy Winata, serta investor dari Singapura dan Malaysia. PT MEG mendapatkan hak pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut selama 30 tahun yang dapat diperpanjang hingga 80 tahun. Kemudian pada Juli 2023, Pemerintah juga menandatangani nota kesepahaman dengan Xinyi Group dari Cina untuk pembangunan pabrik kaca dan solar panel di pulau Rempang, sebagai bagian dari konsep Rempang Eco-City dengan nilai proyek sebesar 11,5 miliar USD.

Proyek yang diperkirakan mampu menarik investasi sebesar Rp 318 triliun dan masuk ke dalam Program Strategis Nasional ini akan menggusur 16 kampung tua yang berada di lingkungan proyek. Padahal, warga setempat telah tinggal secara turun-temurun di lokasi tersebut. Warga Rempang yang menolak rencana ini melakukan aksi demonstrasi di Kota Batam yang berujung terjadinya bentrokan dengan aparat keamanan yang bertindak represif.

Apa yang terjadi di Rempang ini bukanlah yang pertama, namun sudah kesekian kalinya terjadi di Indonesia. Warga yang terdampak penggusuran dipaksa meninggalkan rumahnya, terkadang tanpa ada solusi yang jelas. Dalam kasus Rempang, tidak ada kejelasan perihal ganti rugi, hunian baru dan tempat relokasi, karena warga Rempang dianggap sebagai warga liar karena tidak memiliki sertifikat tanah.

Kami sempat melakukan wawancara terkait konflik tersebut dengan salah satu warga Rempang sekaligus pengelola pantai Tiga Putri yang ada di lokasi tersebut.

“Ada perbedaan pandangan antara Pemerintah dan BP Batam dengan warga, mereka menganggap bahwa masyarakat Rempang adalah warga liar karena tidak memiliki sertifikat. Sedangkan masyarakat berpandangan bahwa mereka bukanlah pendatang liar karena sudah lahir dan tumbuh di sana sejak lama dan mewarisi tanah nenek moyang kami. Bahkan pada tahun 2019 di Rempang ada penyelenggaraan Pemilu, yang artinya mereka tidak bisa dikatakan sebagai warga liar,” ujar Ibu Cahaya.



Gambar 2. Wawancara Masyarakat

Pelabelan itu menjadi persoalan dasar yang memicu terjadinya konflik dengan warga. Menurutnya, jika melihat sejarah, sertifikat terbilang hal baru bagi Indonesia. Aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah dulunya diperoleh tanpa menggunakan sertifikat, misalnya aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah hasil dari menasionalisasi perusahaan asing. “Artinya Pemerintah melakukan tindakan formalistik terhadap warga negara. Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada warga negara dengan memberikan sertifikat, bukan justru melakukan sebaliknya,” sambung Bu Cahaya.

Kasus masyarakat Rempang terjadi akibat tidak adanya perlindungan hukum atas tanah yang kemudian di cap sebagai warga liar. Namun, adanya perlindungan hukum tidak menjamin konflik dapat dicegah. Kami menilai persoalan tersebut terjadi karena perlindungan hukum tentang pertanahan di Indonesia belum optimal. Kasus soal konflik pertanahan dapat menjerat siapapun. Tidak hanya menjerat warga yang tidak memiliki, tetapi yang juga mempunyai sertifikat.

Kasus Rempang mengingatkan kita bahwa sistem pertahanan kita memungkinkan kejadian serupa terulang. Hal itu ditambah bergantungnya Pemerintah dalam jenis usaha ekstratif dengan melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) tanpa mempertimbangkan hak-hak warga negara khususnya masyarakat adat. "Ini mengakibatkan konflik horizontal antara pemerintah dan warga negara,"

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proyek yang akan di bangun di Rempang**

Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City bakal dibangun di Pulau Rempang dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah.

Warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau, menilai Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City dilakukan secara terburu-buru. Pada tahap I, pemerintah akan menggusur lima kampung tua untuk membangun kawasan industri terintegrasi. Padahal, pembangunan rumah relokasi belum dimulai dan analisis mengenai dampak lingkungan masih dalam penyusunan.

Salah satu warga, Amlah (105), Kamis (5/10/2023), mengatakan, satu jengkal pun tidak akan bergeser dari tempat tinggalnya di Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang. Pasir Panjang adalah salah satu dari lima kampung tua yang akan terdampak pembangunan tahap I Rempang Eco City.

### **Pengaruh terhadap sektor otonomi dan pariwisata.**

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita dalam keterangan tertulisnya menjelaskan dampak yang akan dialami Indonesia dari sisi investasi sebagai buntut dari konflik Pulau Rempang ini.

Ronny mengatakan, investasi adalah salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi yang sangat diharapkan pemerintah saat ini. Investasi, kata Ronny, memiliki multiplier effect kepada pembukaan lapangan pekerjaan dan imbas ekonomilainnya ke sektor lain.

"Dari sisi pertumbuhan ekonomi, investasi termasuk salah satu kontributor pertumbuhan yang diharapkan. Terlebih ekonomi global saat ini masih menunjukkan pelemahan," ujar Ronny.

Namun saat ini yang terjadi justru menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai pantai yang ada di pulau rempang tersebut.

Pasalnya, dikarenakan ricuh nya antara masyarakat pulau rempang dan aparat keamanan membuat pengunjung takut dan enggan datang untuk berwisata ke pulau rempang. “Padahal pantai pantai di barelangini khususnya di rempang sudah terkenal akan keindahan alam nya” ujar bu cahaya.

## **LANGKAH PEMERINTAH DAN POLRI DALAM MENANGANI KONFLIK DI REMPANG**

Kapolri Listyo Sigit Parbowo mengatakan bahwa Polri memperkuat sosialisasi kepada masyarakat sebagai prioritas utama dalam menyelesaikan kisruh pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Lantas, apa saja langkah yang dilakukan pemerintah maupun Polri?

### 1. Mengutamakan pendekatan humanis

Badan Pengusaha Batam berkomitmen untuk menyelesaikan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang dengan mengutamakan pendekatan humanis guna menjaga stabilitas keamanan di kawasan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Sehingga, penyerapan aspirasi terlaksana secara maksimal.

“Sesuai arahan Kepala BP Batam sejak awal, pendekatan humanis merupakan komitmen kami untuk melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga,” kata Sudirman dikutip dari situs web BP Batam, Sabtu 16 September 2023.



Gambar 3. Demonstrasi Masyarakat

## 2. Menurunkan 10 tim sosialisasi ke masyarakat

Sebelumnya, pada Kamis, 14 September 2023, Kasatgas Gabungan Percepatan Rempang Eco City Harlas Buana menyatakan BP Batam telah menurunkan 10 tim untuk sosialisasi percepatan pembangunan Kawasan Rempang Eco City tersebut kepada masyarakat di Desa Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dia menyebut tim tersebut masing-masingnya berisi 12 orang yang terdiri dari BP Batam, TNI, dan Polri. "Teknisnya, 10 tim itu akan datang ke tiap rumah warga dan langsung menjelaskan tentang rencana pembangunan tersebut. Atau bisa juga dengan mengumpulkan warga dan menjelaskan tentang rencana pembangunan ini," kata Harlas dikutip dari Antara.

## 3. Masyarakat direlokasi ke rusun untuk sementara waktu

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau menyiapkan armada transportasi untuk membantu warga ke rumah susun (rusun) yang telah disediakan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Rudy Panjaitan mengatakan, rusun yang disediakan pemerintah telah dilengkapi beberapa fasilitas, seperti aliran listrik dan air yang lancar. "Rusunnya selama ini sudah biasa di sewakan," kata Rudy. Rudy menambahkan, warga yang direlokasi ke rusun adalah hanya untuk sementara sambil menunggu hunian baru yang disiapkan BP Batam selesai.

## **SIMPULAN**

Setelah meneliti dan mengamati konflik yang terjadi di pulau rempang tentang pembangunan proyek (rempang eco city) dalam sebuah investasi jangka panjang, dapat ditarik kesimpulan bahwa, hendaknya melakukan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDM yang berkaitan dengan lokasi pemukiman warga lokal. Tanpa pengelolaan yang benar, perusahaan tidak akan mampu bertahan. Serta memberikan hak hak warga setempat terhadap tanah leluhur mereka. Pengaruh dalam sektor pariwisata terjadinya penurunan jumlah pengunjung yang datang yang menyebabkan penurunan pendapatan dalam mengelola Pantai disekitar Rempang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Nurmandi, Ahmad, Menjaga Indonesia dari KEPRI (Peluang, Tantangan, & Proil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau, Badan Pengelola perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, 2012.

Sutedi, Adrian, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Tista, Adwin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa”, Jurnal LamLaj. Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, 2019.

Hadiyati, Nur, “Memahami Problematikan Hak Pengelolaan Tanah Kota Batam Dalam Rangka Penetapan Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus”, Jurnal Yurispruden, Volume 2 Nomor 1, Januari 2019.

Facrureza, D. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Wisatawan Berkunjung Ke Curug Cinulang, Kabupaten Sumedang. Jurnal Sains Terapan, 5(2), 50–60.  
<https://jstp.polteksahid.ac.id/index.php/jstp/article/view/653>

Maciej Serda, Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg, L. V, ... )2022. (ح. فاطمی. Menguak Fenomena Social Loafing Di Kalangan Mahasiswa Yang Patah Hati. *Diponegoro Journal of Management*, 11(5), 343–354.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/36581>

Nugraha, H., & Setiawan, M. (2021). *Pembuatan Buku Profil Untuk Mengenal Pantai Bahagia*. 3. <http://journal.uib.ac.id/index.php/nacospro>

Oliveri, F., Goud, H. K., Mohammed, L., Mehkari, Z., Javed, M., Althwanay, A., Ahsan, F., & Rutkofsky, I. H. (2020). Role of Depression and Anxiety Disorders in Takotsubo Syndrome: The Psychiatric Side of Broken Heart. *Cureus*, 12(9).  
<https://doi.org/10.7759/cureus.10400>

Purnomo, A., Asitah, N., Rosyidah, E., Septianto, A., Daryanti, M. D., & Firdaus, M. (2019). *Generasi Z sebagai Generasi Wirausaha*. 1–4.  
<https://doi.org/10.31227/osf.io/4m7kz>

Ridwan. (2020). Ekonomi dan Pariwisata. *Garis Khatulistiwa Makassar*, 1–2.  
[http://eprints.ipdn.ac.id/5558/13/buku\\_ridwan\\_Ekonomi\\_dan\\_Pariwisata-merge.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/5558/13/buku_ridwan_Ekonomi_dan_Pariwisata-merge.pdf)

Sandy Br. Ginting, M., Kusuma Negara, I. M., & Sudiarta, I. N. (2015). Analisis Segmentasi Pasar Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung Ke Bali Dari Aspek Sosio-Ekonomi Demografi, Psikografi, Dan Perilaku. *Jurnal IPTA*, 3(2), 98.



<https://doi.org/10.24843/ipta.2015.v03.i02.p17>

Savitri, A. (2023). Perencanaan Jetty di Pantai Bahagia Batam sebagai Upaya Pencegahan Abrasi Pantai. *Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil*, 7(2), 265–274.

Seran, M. Y., Hutagalung, S., Rudiyanto, R., Sandrio, L., & Rostini, I. A. (2023). Analisis Konsep 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas) Dalam Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Desa Umatoos, Kabupaten Malaka). *JPTM: Jurnal Penelitian Terapan Mahasiswa*, 1(1), 27–42.

YANTI, F., & PANE, C. A. (2019). Eksistensi Objek Wisata Turi Beach Di Kecamatan Nongsa Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kota Batam. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 4(1), 46–57. <https://doi.org/10.33373/j-his.v4i1.1719>